

DAFTAR PUSTAKA

- Andriadi, Adel. “Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Melalui Program Penyediaan Air Minum Dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) Di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2016-2017,” 2018.
- Bain, Robert, Richard Johnston, Francesco Mitis, Christie Chatterley, and Tom Slaymaker. “Establishing Sustainable Development Goal Baselines for Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene Services.” *Water* 10, no. 12 (2018): 1711.
- BAPPENAS RI. “Presiden Republik Indonesia Peraturan Presiden Republik Indonesia,” no. 1 (2020): 4–7.
- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Vol. 1. UMMPress, 2020.
- Dan, Menikmati, and Kehilangan Hak. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgerlijk Wetboek,” 2014, 1–549.
- ECE, U N. “The Human Rights to Water and Sanitation in Practice: Findings and Lessons Learned from the Work on Equitable Access to Water and Sanitation under the Protocol on Water and Health in the Pan-European Region,” 2019.
- Handoco, Ewin, Welmar Olfan Basten Barat, Winfrontstein Naibaho, Mardame Pangihutan Sinaga, and Reaful Samuel. “Sosialisasi Pentingnya Fasilitas Sarana Air Bersih Di Desa Mbinanga Kecamatan Pegagan Hilir Kabupaten Dairi.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka (JPMB)* 1, no. 3 (2023): 241–46. <https://doi.org/10.58266/jpmb.v1i3.52>.
- Hargono, Arief, Christrijogo Waloejo, Moses Pandin Pandin, and Zuyyinna Choirunnisa. “Penyuluhan Pengolahan Sanitasi Air Bersih Untuk Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Desa Mengare, Gresik.” *Abimanyu: Journal of Community Engagement* 3, no. 1 (2022): 1–10. <https://doi.org/10.26740/abi.v3n1.p1-10>.
- K. Wantjik Saleh. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Kementrian PUPR. “Pengembangan Air Minum Indonesia Dari Masa Ke Masa 1800an-2009,” 2015.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

- Dibahasa Indonesiakan Oleh Prof. R. Subekti, S.H. Dan R. Tjitrosudibio,” 1847. <https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>.
- Kuhu, Frisca, and Abdul Dilapanga. “Pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Dalam Penyediaan Air Bersih Di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara.” *Jurnal Administro: Jurnal Kajian Kebijakan Dan Ilmu Administrasi Negara* 1, no. 1 (2019): 41–44.
- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. “Kovenan Internasional Tentang Hak Ekonomi , Sosial Dan Budaya,” no. 16 Desember 1966 (1976): 1–10.
- Nurul, Siti, and Taupiqqurrahman. “Problematika Pengadaan Tanah Di Indonesia : Tinjauan Pengaturan Dan Pelaksanaan” XXX, no. 1 (2023): 116–32. <https://doi.org/10.28946/sc.v30i1.2748>.
- Participation, Community, I N The, Implementation Of, and Tabalong Regency. “PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PENYEDIAAN AIR MINUM SANITASI BERBASIS MASYARAKAT (PAMSIMAS) DI DESA BONGKANG RT . 06 KECAMATAN HARUAI KABUPATEN TABALONG” 6, no. 2 (2023): 128–40.
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi. “Modul Penggunaan Dan Pengusahaan SDA.” 04. Bandung, 2017.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (n.d.).
- Rights, Office of the United Nations High Commissioner for Human. “About Water and Sanitation.” <https://www.ohchr.org>, n.d.
- Rokom. “Pemerintah Targetkan 2020-2024 Masyarakat Indonesia Akses Air Minum Layak 100%.” Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2022.
- Sidauruk, Hotman. “Tanah Untuk Kepentingan Umum.” <https://kppip.go.id>, n.d.
- Taupiqqurrahman. “Urgensi Pembentukan Peraturan Daerah Terkait Sarana Air Minum Dalam Mendukung Sustainable Development Goals.” *Simbur Cahaya*, 2022, 117–32. <https://doi.org/10.28946/sc.v29i1.1854>.
- Trijunianto, Onny. “Analisis Faktor Keberlanjutan Sarana Air Minum Program Pamsimas Di Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.” *Institut*

Teknologi Sepuluh Nopember, Program Pascasarjana Surabaya, 2016.

Waluyo, Bing. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 1 (2020): 193–99. <https://doi.org/10.23887/jmppkn.v2i1.135>.

Winanti, Atik, Taupiq Qurrahman, and Rosalia Dika Agustanti. “Peningkatan Status Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik.” *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* 3, no. 2 (2021): 431–38. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v3i2.9464>.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 23;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802).